

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Manajemen Berbasis Sekolah

1. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah

Kehadiran konsep manajemen berbasis sekolah dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari konteks gerakan “rekstrukturisasi dan reformasi” sistem pendidikan nasional dengan melakukan upaya perubahan manajemen sekolah. Bertitik tolak dari kondisi tersebut, dipandang perlu membangun suatu sistem manajemen sekolah yang mampu memberikan kemampuan dasar (*basic skills*) bagi peserta didik. Manajemen berbasis sekolah diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, karyawan, orang tua peserta didik dan masyarakat yang berhubungan dengan program sekolah).

Menurut Sudarwan Danim, mengutip pendapat Larry Kuehn dalam ERIC *Clearinghouse on Educational Management* : memiliki banyak nama.¹

¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, (Diva Press, kogyakarta, 2012) h.30

Selain populer dengan sebutan *school based management* atau *school-site management*, nama lain yang maknanya sama atau hampir sama dengan Manajemen Berbasis Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Manajemen lokal sekolah (*local management of schools*), dimana sekolah memiliki otonomi pengelolaan pada tingkat kampus (*building level*), atau kompleks sekolah.
- b. Pembagian kewenangan dalam pembuatan keputusan (*shared decision making*), Dalam kaitan ini, Dinas Diknas melimpahkan sebagian kewenangannya selama ini ke tingkat sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung maupun melalui komite sekolah.
- c. Pengelolaan sekolah secara mandiri (*self-managing school*), Sekolah memiliki kewenangan mengelola diri dalam lingkup yang cukup luas untuk menyusun, dan implementasi.
- d. Sekolah dengan penentuan pengelolaan secara mandiri (*self-determining schools*). Sekolah memiliki kewenangan untuk “menentukan nasib sendiri”, misalnya dalam pengembangan program unggulan, menentukan besarnya pembiayaan, mengatur program sekolah, dan lain-lain.

- e. Otonomi sekolah secara lokal (*locally-autonomous schools*). Program internal sekolah dirancang dan diimplementasikan sendiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan yang mungkin diakses oleh lembaga.
- f. Manajemen sekolah yang bersifat partisipatoris (*schools participatory management*), tempat untuk dapat menciptakan kondisi sekolah yang efektif diperlukan partisipasi semua komunitas sekolah.
- g. Devolusi (*devolution*), berupa perubahan pengelolaan sekolah dari banyak tergantung kepada instansi di atasnya menjadi dikelola dengan kemandirian tertentu sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan komunitas sekolah dan masyarakat sekitarnya.
- h. Desentralisasi pengelolaan sekolah (*school decentralization*). Mesti sekolah merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional, sebagian program yang selama ini banyak dipandu dari instansi di atasnya dikelola dengan cara didesentralisasikan atau dilaksanakan secara mandiri.
- i. Restrukturisasi sekolah (*restructured schools*). Restrukturisasi sekolah berupa perubahan struktur sekolah dari tidak lebih sebagai perpanjangan tangan unit birokrasi di atasnya menjadi lembaga

akademik yang tidak terlalu diikat oleh kaidah-kaidah kerja birokrasi pendidikan.

- j. Sekolah berbasis swakelola atau penyelenggaraan sekolah secara mandiri (*self-governing*). Sebagian program sekolah ini direncanakan, didanai, dilaksanakan, dan dievaluasi sendiri keberhasilannya.
- k. Sekolah berbasis penentuan “nasib” sendiri (*self-determining*). Sekolah memiliki kewenangan untuk mandiri atau menentukan nasib sendiri, misalnya mengenai standar prestasi, program unggulan, muatan lokal, kalender belajar, program khusus, dan sebagainya.
- l. Merujuk pada variasi nama diatas, Manajemen Berbasis Sekolah dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerja di lingkungan sekolah dengan cara menetapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan pembelajaran secara bermutu.

Menurut Mohib Asrori,

Mengutip pendapat Judith Capman : Manajemen Berbasis Sekolah adalah “*school based managemen refers to form education administration in which the school become the primary unit for decision making, it differs from more traditional form of educational administration in which central bureaucracy dominate in the decision making proses*”²

² *Ibid.*, h.33

Manajemen Berbasis Sekolah adalah merujuk pada suatu bentuk administrasi pendidikan, dimana sekolah menjadi unit kecil utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini berbeda dengan bentuk tradisional administrasi pendidikan, yakni pemerintah pusat sangat menonjol dalam pengambilan Keputusan.

Menurut M Ihsan Dacholfani dan Evi Yuzana menyatakan bahwa; “Manajemen Berbasis Sekolah dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah.³ Manajemen Berbasis Sekolah adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah”.

Dengan demikian, Manajemen Berbasis Sekolah pada dasarnya merupakan sistem manajemen, dimana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. Manajemen Berbasis Sekolah memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan disekolah mereka.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 51, ayat (1) menyatakan, “Pengelolaan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah. Selanjutnya, penjelasan pasal 51, ayat (1) menerangkan bahwa, “Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala

³ *Ibid.*, h.37

sekolah/ madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan”.⁴

Nurkholis (2003: 1)

menyatakan bahwa; *“explains that the School Based Management consists of three words, namely management, based, and school. In general, the management can be defined as the process of managing resources effectively to achieve the goal. Viewed from the aspect of education, education management is defined as everything pertaining to the management of the educational process in order to achieve the stated goals, both short-term goals, medium and long-term goals. Second, based word has a basic word base or base. Third, the school said referring to the institution where the process of learning. Starting from the third meaning of the term, the School-Based Management can be defined as everything pertaining to the management of the resources, based on the school itself in the learning process to achieve the goals set”*⁵

Dapat dikatakan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah Manajemen Berbasis Sekolah terdiri dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Secara umum manajemen dapat diartikan sebagai proses mengelola sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan. Ditinjau dari aspek pendidikan, manajemen pendidikan diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah maupun tujuan jangka panjang. Kedua, kata berbasis mempunyai kata dasar basis atau dasar. Ketiga, kata sekolah merujuk pada lembaga tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Bertolak dari arti ketiga

⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁵ Mark Heyward. et.al. RTi : *Implementing School-Based Management in Indonesia* 2011

istilah itu, maka Manajemen Berbasis Sekolah dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan sumber daya yang berdasar pada sekolah itu sendiri dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Otonomi memang bermakna pemilikan kewenangan mengatur semua masalah secara mandiri. Namun, dalam konteks Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia, pelaksanaannya masih terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara nasional, maupun daerah. Artinya otonomi yang dimaksudkan di dalam penjelasan pasal 51 ayat (1) UU Sisdiknas No. 23 Tahun 2003 merupakan bentuk desentralisasi yang bersifat relatif dan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di daerah. Demikian, dengan Manajemen Berbasis Sekolah, tanggung jawab sekolah menjadi lebih besar. Sekolah dituntut untuk menunjukkan hasil kerjanya sehubungan dengan kewenangan lebih besar yang diperolehnya sebagai bentuk akuntabilitas, baik kepada warga sekolah maupun pemerintah. Peran komite sekolah yang dalam hal ini merupakan refleksi dari pemangku kepentingan pendidikan (orang tua, masyarakat, pengguna lulusan, guru, kepala sekolah, dan penyelenggara pendidikan) terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung di

dalam pengelolaan pendidikan para di sekolah. Artinya, dengan Manajemen Berbasis Sekolah tujuan pendidikan yang diharapkan oleh pemangku dapat dipenuhi.

Dengan demikian Manajemen Berbasis Sekolah dapat didefinisikan dari pendapat-pendapat para ahli tersebut diatas. bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah sebagai bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah secara individual. Kewenangan diberikan kepada kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar dalam proses pendidikan dan memberikan mereka tanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang anggaran, personil, dan kurikulum. Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) lokal dalam pengambilan keputusan akan dapat meningkatkan lingkungan belajar yang efektif bagi peserta didik/siswa.

2. Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah.

Menurut Djam'an Satori Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah adalah

Menyatakan bahwa; Tujuan Manajemen Berbasis Sekolah, adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan cara memberdayakan seluruh potensi sekolah dan stakeholder-nya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen pendidikan/sekolah professional.⁶

Menurut Jamal Ma'mur Asmani, menyatakan bahwa;

Tujuan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumberdaya manusia, guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum. Bagi sumber daya manusia, peningkatan kualitasbbukan hanya meningkatnya pengetahuan dan ketrampilannya, melainkan meningkatkan kesejahteraannya pula.⁷

Sedangkan Menurut Kustini Hardi dalam Sri Minarti (2011:69), ada tiga tujuan diterapkannya manajemen berbasis sekolah (MBS) yaitu:

1. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam aspek Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk meningkatkan mutu sekolah.
2. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik disekolah maupun dilingkungan masyarakat setempat.
3. Mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dan unsur komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah.⁸

⁶ Jamal., *op.cit.* h. 48

⁷ *Ibid.* h.49-49

⁸ <http://nafitaturrohmah.Wordpress.com/2013/05/30/apa-tujuan-manajemen-berbasis-sekolah.mbs>, diakses pada tanggal 4 November 2016 jam 20.00

Sedangkan Menurut Slamet, Manajemen Berbasis Sekolah bertujuan untuk "memberdayakan" sekolah, terutama sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitarnya) melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan.⁹ Sekolah yang berdaya pada umumnya adalah sekolah yang mempunyai tingkat kemandirian tinggi dan tingkat ketergantungan rendah, bersifat adaptif- antisipatif dan proaktif, memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dsb.), bertanggung jawab terhadap hasil sekolah, memiliki kontrol yang kuat terhadap input manajemen dan sumber dayanya, melakukan kontrol terhadap kondisi kerja, memiliki komitmen yang tinggi pada dirinya, serta menilai sendiri pencapaian prestasinya. Sumber daya manusia sekolah yang berdaya, pada umumnya, memiliki ciri-ciri: pekerjaan adalah miliknya, bertanggung jawab, memiliki cara bagaimana sesuatu dikerjakan, pekerjaan yang dilakukan memiliki kontribusi, mengetahui posisinya berada di mana, memiliki kontrol terhadap pekerjaan, serta pekerjaan merupakan bagian hidupnya.

⁹ <http://nafitaturrohmah.Wordpress.com/2013/05/30/apa-tujuan-manajemen-berbasis-sekolah.mbs>, diakses pada tanggal 4 November 2016 jam 20.00

Dengan demikian tujuan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan (kualitas peserta didik, pembelajaran, kurikulum, sumber daya manusia, profesionalisme guru, kepala sekolah, pelayanan, dan kesejahteraan). Dengan cara melakukan perencanaan, kontrol serta evaluasi secara terus menerus berkesinambungan hingga tercapai tujuan yang diinginkan yaitu peningkatan mutu sekolah dengan jalan melibatkan atau memberdayakan seluruh potensi sekolah dan stakeholder-nya sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan menerapkan kaidah-kaidah manajemen pendidikan/sekolah profesional.

3. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah.

Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah yang ditawarkan sebagai bentuk operasional desentralisasi pendidikan dalam konteks ekonomi daerah akan memberikan wawasan baru terhadap sistem yang sedang berjalan selama ini. Hal ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kerja sekolah, dengan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.

Peserta didik biasanya datang dari berbagai latar belakang kesukuan dan tingkat sosial, salah satu perhatian sekolah harus

ditujukan pada asas pemerataan, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Disisi lain sekolah juga harus meningkatkan efesiensi, partisipasi, dan mutu serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah.

Menurut E. Mulyasa, menyatakan bahwa; Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah dapat diketahui antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar-mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya lainnya dan sistem administrasi secara keseluruhan.¹⁰

Sejalan dengan itu, menurut Saud berdasarkan pelaksanaan di negara maju mengemukakan bahwa karakteristik dasar Manajemen Berbasis Sekolah adalah pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan professional, serta adanya team work yang tinggi dan professional.¹¹

Adapun karakteristik manajemen berbasis sekolah (MBS) menurut Rohiat, Kemunculan karakteristik ideal sekolah pada abad ke-21 seperti disajikan berikut ini (*school for the twenty-first characteristic*) seperti :

¹⁰ Mulyasa, *op.cit*, h.29

¹¹ Jamal, *op.cit*. h. 75.

1. Adanya keragaman dalam pola pengkajian guru.
2. Istilah populernya adalah pendekatan prestasi merit system.
3. Otonomi manajemen sekolah.
4. Pemberdayaan guru secara optimal.
5. Pengelolaan sekolah secara patisipatif. Kepala sekolah mampu bekerja dengan melalui seluruh komunitas sekolah agar masing-masing dapat menjalankan tugas.
6. Sistem yang disentralisasikan di bidang penganggaran.
7. Sekolah dengan pilihan atau otonomi sekolah dalam menentukan aneka pilihan.
8. Hubungan kemitraan *partnership* antara dunia bisnis dan dunia pendidikan.
9. Akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif mandiri.
10. Pemasaran sekolah secara komperensif
11. Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki sejumlah karakteristik
proses sebagai berikut :
 - a. Proses belajar mengajar dengan efektivitas yang tinggi.
 - b. Kepemimpinan sekolah yang kuat.
 - c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.
 - d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif.

- e. Sekolah memiliki budaya mutu.
- f. Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas dan dinamis.

12. Input Pendidikan yaitu :

- a. Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas secara formal sekolah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan kebijakan tujuan.
- b. Sumber daya tersedia dengan siap merupakan input penting yang diperlukan untuk kelangsungan proses pendidikan di sekolah.
- c. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi.
- d. Memiliki harapan prestasi tinggi sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah.
- e. Fokus pada pelanggan (khususnya siswa).
- f. Input manajemen sekolah yang menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah memiliki input manajemen yang memadai untuk menjalankan roda sekolah.¹².

4. Indikator Manajemen Berbasis Sekolah.

Menurut Djam'an Satori, Indikatornya adalah sebagai berikut :

- a. Partisipasi masyarakat diwadahi melalui Komite Sekolah.
- b. Transparansi pengelolaan sekolah (program dan anggaran).
- c. Program sekolah realitis (*need assessmen*).
- d. Pemahaman stakeholder mengenai visi dan misi sekolah.
- e. Lingkungan fisik sekolah nyaman, terawat.

¹²Kompri, *Manajemen Sekolah Teori & Praktek*, (Alfabeta, Bandung: 2014).h. 44-45.

- f. Iklim sekolah kondusif.
- g. Berorientasi mutu, penciptaan budaya mutu.
- h. Meningkatnya kinerja professional kepala sekolah dan guru.
- i. Kepemimpinan sekolah berkembang demokratis (*policy and decision making, planning and programing*).
- j. Upaya memenuhi fasilitas pendukung KBM meningkat.
- k. Kesejahteraan guru meningkat.
- l. Pelayanan berorientasi pada siswa/murid.
- m. Budaya konformitas dalam pengelolaan sekolah berkurang.¹³

Sedangkan menurut Muhammad Faiq Dzaki, Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola Manajemen Berbasis Sekolah, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal berikut :

- a. Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi sekolah tersebut.
- b. Mengetahui sumber daya yang dimiliki dan “input” pendidikan yang akan dikembangkan.
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya.
- d. Bertanggung jawab terhadap orang tua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah.
- e. Persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif-inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.¹⁴

Indikator diatas adalah fakta yang tidak biasa diingkari, artinya indikator-indikator hanya akibat dari implementasi yang telah menerapkan secara benar manajemen berbasis sekolah, walau sekolah sudah mengumumkan aplikasi manajemen berbasis sekolah, kalau indikatornya belum tampak, maka patut di analisis, faktor apa yang menyebabkannya, apakah aplikasi Manajemen Berbasis Sekolah

¹³Jamal, *op.cit.* h.98

¹⁴ *Ibid.*, h. 99

hanya dipermukaan atau dikulit saja, sementara didalamnya tidak ada perubahan. Oleh sebab itu, indikator diatas menjadi parameter kesuksesan aplikasi Manajemen Berbasis Sekolah. Komite Sekolah jangan mudah percaya terhadap klaim, harus ada indikator yang jelas yang dapat di jadikan bukti bahwa sekolah tersebut benar-benar telah menerapkan manajemen berbasis sekolah. Dengan cara ini, maka sekolah diharapkan akan menyusun dan melaksanakan program pada tahun-tahun yang akan datang lebih baik

5. Ciri-Ciri Manajemen Berbasis Sekolah.

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri (otonomi) oleh sekolah dengan melibatkan, tenaga sekolah, orang tua, peserta didik, dan anggota masyarakat serta semua kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Menurut Muhammad Faiq Dzaki, Ciri-ciri Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah sebagai berikut :

- a. Visi dan misi dirumuskan bersama oleh Kepala Sekolah, Guru, unsur siswa, Alumni, dan Stakeholder;
- b. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) mengacu pada visi dan misi yang telah dirumuskan;

- c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang disusun bersama oleh kepala sekolah, guru, dan komite sekolah secara transparan;
- d. Akuntabel (tanggung gugat);
- e. Otonomi sekolah terwujud yang ditandai kemandirian dan dinamika sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Pengambilan keputusan dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis;
- g. Terbuka menerima masukan, kritik, dan saran dari pihak manapun demi penyempurnaan program;
- h. Mampu membangun komitmen seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- i. Pemberdayaan seluruh potensi warga sekolah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
- j. Terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk peningkatan kinerja sekolah;
- k. Mampu memberikan rasa bangga kepada semua pihak (warga masyarakat dan sekolah);
- l. Ada transparansi dan akuntabilitas publik didalam melaksanakan seluruh kegiatan.¹⁵

Sedangkan menurut Supriono dan Ahmad, mengemukakan bahwa ada beberapa ciri-ciri manajemen berbasis sekolah antara lain :

- a. Adanya upaya peningkatan peran serta BP3 dan masyarakat untuk mendukung kinerja sekolah.
- b. Program sekolah disusun dan di laksanakan dengan mengutamakan kepentingan proses belajar mengajar.
- c. Menerapkan prinsip efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya sekolah (anggaran, personel, fasilitas).
- d. Mampu mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan kondisi lingkungan sekolah walau berbeda dari pola umum atau kebiasaan.
- e. Menjamin terpeliharanya sekolah yang bertanggung jawab kepada masyarakat, selain pada pemerintah atau yayasan.
- f. Meningkatkan profesionalisme personal sekolah.
- g. Meningkatkan kemandirian sekolah di segala bidang.
- h. Adanya keterlibatan semua unsur terkait dalam Perencanaan Program Sekolah (PPS), pelaksanaan sampai dengan evaluasi (kepala sekolah, guru, komite sekolah, tokoh masyarakat dan lain-lain).

¹⁵ *Ibid.*, h. 99

- i. Adanya keterbukaan dalam pengelolaan pendidikan sekolah, baik menyangkut program, anggaran, ketenagaan dan prestasi.
- j. Pertanggungjawaban sekolah di lakukan baik terhadap pemerintah yayasan maupun masyarakat.¹⁶

Selanjutnya menurut Dwi John, mengemukakan bahwa apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka Manajemen Berbasis Sekolah akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada, Ciri-ciri manajemen sekolah yang mengacu pada Manajemen Berbasis Sekolah adalah

- a. Visi dan misi dirumuskan bersama oleh Kepala Sekolah, Guru, unsur siswa, Alumni, dan Stakeholder;
- b. Rencana Pengembangan Sekolah (RPS), Rencana Kegiatan Sekolah (RKS), Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) mengacu pada visi dan misi yang telah dirumuskan;
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RABPS) atau Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) sesuai dengan Rencana Pengembangan Sekolah atau Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) yang disusun bersama oleh kepala sekolah, guru, dan komite sekolah secara transparan;
- d. Akuntabel (tanggung gugat);
- e. Otonomi sekolah terwujud yang ditandai kemandirian dan dinamika sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- f. Pengambilan keputusan dilaksanakan secara partisipatif dan demokratis;
- g. Terbuka menerima masukan, kritik, dan saran dari pihak manapun demi penyempurnaan program;
- h. Mampu membangun komitmen seluruh warga sekolah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan;
- i. Pemberdayaan seluruh potensi warga sekolah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

¹⁶ <http://sobatgeo.blogspot.co.id/2017/01/ciri-ciri-manajemen-berbasis-sekolah.html> , diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

- j. Terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk peningkatan kinerja sekolah;
- k. Mampu memberikan rasa bangga kepada semua pihak (warga masyarakat dan sekolah);
- l. Ada transparansi dan akuntabilitas publik didalam melaksanakan seluruh kegiatan.¹⁷

Dengan demikian, Manajemen Berbasis Sekolah yang akan dikembangkan merupakan bentuk alternatif sekolah dalam program desentralisasi bidang pendidikan, yang ditandai dengan adanya otonomi luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang tinggi tapi masih dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Tetapi semua ini harus mengakibatkan peningkatan proses belajar mengajar. Sekolah yang menerapkan prinsip-prinsip MBS adalah sekolah yang harus lebih bertanggungjawab (*high responsibility*), kreatif dalam bertindak dan mempunyai wewenang lebih (*more authority*) serta dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh yang berkepentingan/tanggung gugat (*public accountability by stake holders*). Diharapkan dengan menerapkan manajemen pola MBS, sekolah lebih berdaya dalam beberapa hal berikut :¹⁸

¹⁷ <http://ainamulyana.blogspot.co.id/2011/12/manaemen-berbasis-sekolah-mbs.html>
Diakses pada tanggal 09 Pebruari 2017 pada jam 20.00

¹⁸ <http://ainamulyana.blogspot.co.id/2011/12/manaemen-berbasis-sekolah-mbs.html>
Diakses pada tanggal 09 Pebruari 2017 pada jam 20.00

- a. Menyadari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi sekolah tersebut
- b. Mengetahui sumberdaya yang dimiliki dan “input” pendidikan yang akan dikembangkan
- c. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk kemajuan lembaganya
- d. Bertanggungjawab terhadap orangtua, masyarakat, lembaga terkait, dan pemerintah dalam penyelenggaraan sekolah
- e. Persaingan sehat dengan sekolah lain dalam usaha-usaha kreatif-inovatif untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan.

6. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Menurut Andang Suhartanto,

Dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan amanat rakyat yang telah tertuang dalam UU Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional (Propernas 2000 – 2004). Amanat rakyat ini selaras dengan kebijakan otonomi daerah, yang telah memposisikan kabupaten/kota sebagai pemegang kewenangan dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pendidikan.¹⁹ Pelaksanaan pendidikan di daerah tidak hanya diserahkan kepada kabupaten/kota, melainkan juga dalam beberapa hal telah diberikan kepada satuan

¹⁹ <https://binham.wordpress.com/2012/04/08/>, diakses pada tanggal 10 Februari, pada jam 20.00

pendidikan, baik pada jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (*Community-based participation*) dan manajemen berbasis sekolah (*school-based management*).

Paradigma manajemen berbasis sekolah (MBS) beranggapan bahwa, satu-satunya jalan masuk yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevansi adalah demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah, guru, dan masyarakat adalah pelaku utama dan terdepan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sehingga segala keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada tingkatan mikro harus dihasilkan dari interaksi ketiga pihak tersebut. Masyarakat adalah stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan pendidikan di sekolah, karena mereka adalah pembayar pendidikan melalui pembayaran pajak, sehingga sekolah-sekolah harus bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Namun demikian, entitas yang disebut “masyarakat” itu sangat kompleks dan tak terbatas (borderless) sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan masyarakat sebagai stakeholder pendidikan. Untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah, konsep masyarakat itu perlu disederhanakan (simplified) agar menjadi mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu. Penyederhanaan konsep masyarakat itu dilakukan melalui “perwakilan” fungsi stakeholder, dengan jalan membentuk komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah hendaknya merepresentasikan keragaman yang ada agar benar-benar dapat mewakili masyarakat. Interaksi antara masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan komite sekolah. Dengan demikian, komite sekolah merupakan badan yang mandiri yang memediasi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Disamping itu, komite sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang

bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

a. Peran dan Fungsi Komite Sekolah

Keberadaan komite sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada.

Adapun peran serta komite sekolah berdasarkan Keputusan Mendiknas No. 044/U/2000 adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Pendukung (supporting agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (eksklusif) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan

Untuk dapat memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat, sekolah harus dapat membina kerja sama dengan orang tua dan masyarakat, menciptakan suasana kondusif dan

menyenangkan bagi peserta didik dan warga sekolah. Itulah sebabnya maka paradigma MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) mengandung makna sebagai manajemen partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sehingga semua kebijakan dan keputusan yang di ambil adalah kebijakan dan keputusan bersama, untuk mencaai keberhasilan bersama.²⁰

Dengan demikian, prinsip kemandirian dalam Manajemen Berbasis Sekolah adalah kemandirian dalam nuansa kebersamaan. Hal ini merupakan aplikasi dari prinsip-prinsip yang di sebut sebagai total quality management, melalui suatu mekanisme yang di kenal dengan konsepsi total football dengan menekankan pada mobilisasi kekuatan secara sinergis yang mengarah pada satu tujuan,yaitu peningkatan mutu dan kesesuaian pendidikan dengan pengembangan masyarakat.²¹

Untuk menjalankan perannya itu, komite sekolah juga berfungsi dalam hal sebagai berikut :

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan

²⁰ Hasbullah, Otonomi Pendidikan. (PT.Grafindo, Jakarta : 2006) h. 91-93

²¹ Uno, Hamzah B, Profesi Kependidikan (PT.Bumi Aksara, Jakarta : 2007) h.93

- / organisasi / dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- 2) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - 3) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 - a) Kebijakan dan program pendidikan.
 - b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
 - c) Kriteria kinerja satuan pendidikan.
 - d) Kriteria tenaga pendidikan.
 - e) Kriteria fasilitas pendidikan.
 - f) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendidikan.
 - 4) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 - 5) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.²²

B. Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah

1. Pengertian Manajemen Peserta Didik

Menurut Mohamad Mustari, Manajemen Peserta Didik adalah (*Pupil Personnel Administration*) adalah Layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual, seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Manajemen peserta didik dapat juga diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan lulus sekolah. Manajemen peserta didik merupakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan masalah peserta didik di sekolah.²³

Dan menurut UU. No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Sedangkan dari pengertian beberapa ahli, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang/individu yang mendapat pelayanan pendidikan.

²² Hasbullah, Otonomi Pendidikan. (PT.Grafindo, Jakarta : 2006) h. 93-94

²³ Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan*, (Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2014). h. 108.

Sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Demikian juga Hamalik menambahkan bahwa siswa adalah suatu organisme yang hidup di dalam dirinya beraneka ragam kemungkinan potensi yang hidup dan berkembang.

Dengan demikian pengertian manajemen peserta didik dapat disimpulkan bahwa Manajemen Peserta Didik adalah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas atau diluar kelas seperti, pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah.

Manajemen Peserta Didik dapat pula diartikan sebagai suatu proses pengurusan segala hal yang berkaitan dengan siswa di suatu sekolah mulai dari perencanaan, penerimaan siswa, pembinaan yang dilakukan selama siswa berada di sekolah, sampai dengan siswa menyelesaikan pendidikannya di sekolah.

2. Penerimaan Peserta Didik Baru

Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakikatnya merupakan proses pencarian, menentukan,

dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan.

Penerimaan siswa merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada siswa yang baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Kegiatan ini mewarnai kesibukan sekolah menjelang tahun ajaran baru, dimana kepala sekolah perlu membentuk semacam kepanitiaan yang dijadikan sebagai penerima siswa baru. Dalam hal ini kepala sekolah dapat berpedoman pada pedomanan siswa baru yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas) dan Dirjen Pendidikan Menengah (Dikmen).

Selain hal tersebut di atas ada beberapa kegiatan yang lain yang harus dilakukan ketika penerimaan siswa baru yaitu meliputi; penetapan daya tampung, penetapan syarat-syarat bagi calon siswa untuk dapat diterima di sekolah yang bersangkutan dan pembentukan panitia penerimaan siswa baru.

Langkah-langkah rekrutmen peserta didik (siswa baru) adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik.
2. Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik dilakukan secara terbuka.

3. Selanjutnya adalah tahapan seleksi peserta didik, seleksi peserta didik adalah kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku,

Adapun cara-cara seleksi yang dapat digunakan adalah:

- a. Melalui tes atau ujian
- b. Melalui penelusuran bakat kemampuan
- c. Berdasarkan nilai STTB atau nilai UAN

Kegiatan selanjutnya setelah penerimaan peserta didik baru adalah pendataan peserta didik. Data ini sangat diperlukan untuk melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan jika peserta didik menemui kesulitan dalam belajar, memberi pertimbangan terhadap prestasi belajar peserta didik, memberikan saran kepada orang tua tentang prestasi belajar peserta didik, pindah sekolah, dan sebagainya.

3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Mulai tahun pelajaran 2016/2017 Masa Orientasi Sekolah (MOS) diganti dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), tujuan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Peserta Didik Baru berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru ada 5 tujuan Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi peserta didik baru, dan pada masing-masing tujuan dapat diisi dengan berbagai kegiatan. Pada silabus Pengenalan Lingkungan Sekolah sudah tercantum nama kegiatan-kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah baik yang wajib maupun pilihan. Adapun tujuan Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Mengenali potensi diri peserta didik baru
- b. Membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah
- c. Menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik.
- d. Mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya.
- e. Menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih, dan sehat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri peserta didik.

4. Pengelompokan Peserta Didik

Setelah peserta didik didaftar ulang, mereka perlu dikelompokkan atau diklasifikasikan. Pengklasifikasian bukan dimaksud untuk mengkotak-kotakan peserta didik, melainkan justru dimaksudkan untuk membantu keberhasilan belajar peserta didik. Oleh karena itu pengelompokan tidak boleh dilaksanakan untuk keperluan lain, selain untuk keperluan dan kebaikan peserta didik sendiri.

Menurut Hendyat Soetopo, dasar-dasar pengelompokan peserta didik ada 5 macam yaitu:

- a. *Friendship Grouping* (Pengelompokan berdasarkan kesukaan memilih teman).

Pengelompokan peserta didik didasarkan pada kesukaan didalam memilih teman antara peserta didik itu sendiri. Jadi dalam hal ini peserta didik mempunyai kebebasan dalam memilih teman untuk dijadikan sebagai anggota kelompoknya.

- b. *Achievement Grouping* (Pengelompokan berdasarkan prestasi)

Pengelompokan peserta didik didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh siswa. Dalam pengelompokan ini biasanya diadakan percampuran antara peserta didik yang berprestasi tinggi dengan peserta didik yang berprestasi rendah.

c. *Aptitude Grouping* (Pengkelompokkan berdasarkan bakat)

Pengelompokkan peserta didik didasarkan atas kemampuan dan bakat yang sesuai dengan apa yang dimiliki peserta didik itu sendiri.

d. *Attention or Interest Grouping* (Pengelompokkan berdasarkan minat)

Pengelompokkan peserta didik didasarkan atas perhatian atau minat yang didasari kesenangan peserta didik itu sendiri. Pengelompokkan ini didasari oleh adanya peserta didik yang mempunyai bakat dalam bidang tertentu namun si peserta didik tersebut tidak senang dengan bakat yang dimilikinya.

e. *Intelligence Grouping* (Pengelompokkan berdasarkan kecerdasan)

Pengelompokkan peserta didik yang didasarkan atas hasil tes intelegensi yang diberikan kepada peserta didik itu sendiri.²⁴

5. Tata Tertib

Menurut Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal: 1 Mei 1974, No, 14/U/1974, tata tertib sekolah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya.

²⁴ Tim dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Alfabeta, Bandung: 2013), h., 211

Tata tertib murid adalah bagian dari tata tertib sekolah di samping itu masih ada tata tertib guru dan tata tertib tenaga administratif.

Kewajiban menaati tata tertib adalah hal yang penting, sebab bagian dari sistem persekolahan dan bukan sekedar sebagai kelengkapan sekolah.

6. Pembinaan dan Pengembangan Peserta Didik

Dalam manajemen peserta didik melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap peserta didik dilakukan sehingga peserta didik mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Dalam pembinaan dan pengembangan biasanya melakukan kegiatan yang disebut dengan kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan kurikuler adalah semua kegiatan yang telah ditentukan dalam kurikulum yang pelaksanaannya dilakukan pada jam-jam pelajaran. Kegiatan kurikuler dalam bentuk proses belajar dikelas dengan nama mata pelajaran atau bidang studi yang ada didalam sekolah. Setiap peserta didik wajib mengikuti kegiatan kurikuler ini. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan peserta didik yang dilaksanakan di luar ketentuan yang telah ada didalam kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler ini biasanya terbentuk berdasarkan bakat dan

minat yang dimiliki oleh peserta didik. Setiap peserta didik tidak harus mengikuti semua kegiatan ekstrakurikuler, ia bias memilih kegiatan mana yang dapat mengembangkan kemampuan dirinya. Bias dikatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan wadah kegiatan peserta didik di luar pelajaran atau di luar kegiatan kurikuler. Contoh kegiatan ekstrakurikuler: OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), Kelompok Rohis/Rokris, Bela diri, Basket, Pramuka, Teater, dan lain-lain.

Dalam kegiatan pembinaan dan pengembangan inilah peserta didik diproses untuk menjadi manusia yang diharapkan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik, harus ditumbuh kembangkan secara optimal melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Dalam manajemen peserta didik, tidak boleh ada anggapan bahwa kegiatan kurikuler lebih penting dari kegiatan ekstrakurikuler atau sebaliknya. Kedua kegiatan ini alangkah baiknya dilaksanakan karena saling menunjang dalam proses pembinaan dan pengembangan kemampuan peserta didik.

Keberhasilan pembinaan dan pengembangan peserta didik diukur melalui proses penilaian yang dilakukan oleh lembaga pendidikan (oleh guru). Ukuran yang sering digunakan adalah naik kelas dan tidak naik kelas bagi peserta didik yang belum mencapai

tingkat akhir serta lulus dan tidak lulus bagi peserta didik ditingkat akhir sebuah lembaga pendidikan (sekolah). Penilaian yang dilakukan oleh guru tentu saja didasarkan prinsip-prinsip penilaian yang berlaku dilembaga pendidikan (sekolah) tersebut.

7. Kajian Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan hasil evaluasi kami dari hasil-hasil penelitian terdahulu hasil kajian penelitian yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Adeolu Joshua Ayeni¹ & Williams Olusola Ibukun, pada tahun 2013, dengan *judul A Conceptual Model for School-Based Management Operation and Quality Assurance in Nigerian Secondary Schools.*²⁵ *This paper examined the School-Based Management Committee's (SBMC) involvement and effectiveness in school governance, curriculum implementation and students' learning outcomes in Nigerian secondary schools; the major challenges facing effective operation of SBMCs were identified as low capacity of key members of the SBMCs; poor attendance of members at meetings due to lack of incentives and financial support from the government; lack of cooperation from the schools; and PTA's resistance to the SBMC initiatives;*

²⁵ Adeolu Joshua Ayeni¹ & Williams Olusola Ibukun, pada tahun 2013, dengan judul *A Conceptual Model for School-Based Management Operation and Quality Assurance in Nigerian Secondary Schools*, diakses pada file:///D:/skripsi%20ata/jurnal%20mbs.pdf tanggal 9 desember 2016 pukul 18.00

these resulted in ineffective school management and low level of students' academic achievement. It was concluded that a conceptual model of inter-relatedness be adopted to strengthen the operational capacity of SBMCs for efficient service delivery and quality learning outcomes in secondary schools.

Telah dilakukan penelitian oleh Adeolu Joshua Ayeni dan Williams Olusola Ibukun, pada tahun 2013, pada sekolah menengah di negara Nigeria bahwa “Penyelenggaraan pendidikan Manajemen Sekolah Berbasis Komite (SBMC) di Nigeria tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sesuai kebutuhan masyarakat,. Diidentifikasi sebagai rendahnya kapasitas anggota kunci dari SBMCs; miskin, selain itu kurangnya insentif dan dukungan keuangan dari pemerintah; serta kurangnya kerjasama dari sekolah; dan ketahanan PTA terhadap inisiatif SBMC; ini yang mengakibatkan proses kegiatan belajar mengajar, kurikulum dan rendahnya hasil belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model konseptual antar keterkaitan diadopsi untuk memperkuat kapasitas operasional SBMCs untuk pelayanan dan pembelajaran yang berkualitas hasil efisien dalam sekolah menengah tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.”

2. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hendi Apriyanto, pada tahun 2013, dengan judul “Implementasi Manajemen Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Jalan Soekarno Hatta Bergas 50552 Kabupaten Semarang”²⁶

Dalam penelitian tersebut dihasilkan perencanaan terhadap program perekrutmen peserta didik baru, kegiatan belajar mengajar di kelas dan pengelompokan belajar peserta didik, program bimbingan dan penyuluhan serta kegiatan ekstra kulikuler peserta didik dengan demikian SMA Negeri I Bergas telah melaksanakan manajemen peserta didik yang cukup baik. Sebagai bukti lulusan atau output dari SMA N 1 Bergas tidak kalah saing dengan SMA lainnya di Kabupaten Semarang.

²⁶Hendi Priyanto, dalam Skripsi berjudul; *Implementasi Manajemen Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Negeri I Bergas* (Semarang Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, 2014).